

SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen) STIES

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI
SEKTOR PUBLIK DI BANDA ACEH**
(Studi Pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh)

Oleh :

Indra Kesuma, Abad

Jurusan Ekonomi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh

Abstract: *The purpose of this study was to examine the influence of human resource competencies, the role of internal auditor and controlling activity on the value of financial reporting information North Aceh regency government. The population in this study was all of the local working units (SKPD). Data used was primary data collected from respondents with questionnaire. Furthermore, for the data test done validity test, reliability test and hypothesis test. The getting data was done multiple linear regression. The result of this study showed that all variables are human resource competencies, the role of the internal auditor, and controlling activity simultaneously or partially have positive influence on value of financial reporting information.*

Keyword: *human resource competencies the role of the internal auditor, controlling activity and value of financial reporting information*

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan pada organisasi sektor publik. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai pada bagian keuangan Pemerintah Aceh. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur dan referensi, untuk pengujian data dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh sebagai salah satu pusat Pemerintahan di Provinsi Aceh telah melaksanakan penyajian laporan keuangan namun pelaksanaan penyajian laporan keuangan tersebut belum optimal sebagaimana yang diharapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Organisasi Sektor Publik.

PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia sedang berlangsung diberbagai bidang dan telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing emi memajukan daerah tersebut (Safitri, 2009:12)

Dengan otonomi daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002:44). Selanjutnya Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM). Kewenangan pendanaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagunaan potensi keuangan daerah dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat-daerah dan antar daerah (Mardiasmo, 2002:12). Kewenangan Pendanaan tersebut memerlukan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif (Kawedar, 2008).

Kewenangan pengelolaan melalui otonomi daerah tersebut menuntut kepada Pemerintah Daerah yaitu harus mempertanggungjawaban pengelolaan dana melalui laporan keuangan pemerintah daerah dan Laporan keuangan daerah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 setelah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut bahwa laporan keuangan daerah minimal berupa realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan, dan disajikan secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian Pemerintah daerah berkewajiban menyajikan informasi melalui laporan keuangan secara taranparan dan akuntabilitas untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik

oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Pemerintah Aceh adalah salah satu Pemerintah daerah yang diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 2005. Sebagai otonomi khusus, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan dana, sumber daya manusia sesuai dengan prioritas pembangunan. Pemerintah Aceh telah menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan kepada masyarakat setiap tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Informasi ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah Aceh dan menjadi sarana komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan masyarakat serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh

Namun, penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh belum optimal sebagaimana yang diharapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dapat dilihat tentang unsur laporan keuangan pertanggungjawaban yaitu tidak membuat unsur laporan arus kas, pada hal laporan arus kas sangat penting untuk mengetahui aliran dan posisi kas. Selain itu, terjadi kebocoran kas daerah sesuai hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2011. Disamping itu, bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk Catatan Laporan Keuangan, seharusnya laporan keuangan yang dipublikasikan adalah laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas lengkap dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu serta mendapatkan bukti mengenai analisis penyajian laporan keuangan pada organisasi sektor publik.

Pembahasan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab beikut akan membahas mengenai kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, sub bab ketiga mengenai metodologi penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis. Sub

bab keempat membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dan sub bab terakhir mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Laporan Keuangan

Penyajian laporan Keuangan

Menurut Muindro (2010:291) Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, Selanjutnya Muindro menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermabfaat bagi para penggunaan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya

Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005, Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

menurut Muindro Renyowijoyo (2010:171) mengatakan bahwa Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan tranparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2). Neraca, 3) Laporan Arus Kas, 4) Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya Muindro mengatakan bahwa Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada DPRD/masyarakat, laporan keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Menurut Pendapat Deedi Nordiawan (2008:153) menyatakan bahwa unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 meliputi 1) Aset, 2) Kewajiban, 3) Ekuitas, 4) Pendapatan, 5) Belanja, 6) Pembiayaan, 7) Laporan Arus Kas.

Tujuan Laporan Keuangan Daerah (LKD)

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002). Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 2002 dalam Rohman 2009).

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah 1). Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik, 2). Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Hipotesis Penelitian

Dari permasalahan yang diajukan dan tujuan penelitian mengenai analisis penyajian laporan keuangan pada organisasi sektor publik, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai

berikut: Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik (Studi pada Pemerintah Aceh) telah dilaksanakan secara optimal sebagaimana yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sensus dimana semua anggota populasi dijadikan responden, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada bagian keuangan pemerintah aceh sebanyak 35 responden.

Operasional Variabel Penelitian

Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No 71 Tahun 2010).

Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis hipotesis diskriptif. Menurut Sugyono (2001:147) mengatakan bahwa hipotesis dekritif yang diuji dengan statistic parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sample dibandingkan dengan standar. Selanjutnya Sugyono mengatakan untuk menguji hipotesisi deskriptif satu variabel bila datanya berbentuk rasio atau interval maka digunakan t-test satu sampel.

Rancangan Pengujian Hipotesis

Data yang diperoleh dari responden perlu diuji, pengujian meliputi uji validitas (*validity*) dan reliability (*reliability*). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Koefisien validitas menggambarkan tingkat kemampuan instrument untuk mengungkapkan data atau informasi dari variabel yang diukur.

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji ini dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid. Pengujian

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *cronboach alpha* masing-masing instrument. Bila *cronboach alphanya* memiliki nilai lebih besar dari 0,60 Sekaran (2006:177) yang menyatakan bahwa pada umumnya reliabilitas yang nilai r-nya kurang dari 0,6 dikatakan kurang reliable, antara 0,6 sampai 0,8 adalah cukup reliable, dan diatas 0,8 suatu instrument dikatakan baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

Hasil Uji Validitas

Uji Validitas berdasarkan output SPSS dinyatakan valid karena seluruh pernyataan menunjukkan nilai total *Corrected Item-Total correlation* > 0,3 atau probabilitas kurang dari 0,05.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha berada diatas 0,60, dengan demikian pengukuran reliabilitas menunjukkan pengukuran keandalan memenuhi kredibilitas Cronbach`s Alpha sebagaimana yang menjadi persyaratan dimana keandalan dalam kisaran 0,60-0,80 bisa diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel						
Hasil Uji t One Sampel						
Test Value = 5						
95%						
Confidence						
Interval of						
the						
difference						
Sig.						
(2- Mean						
D taile Differ						
t f d) ence						
Low Uppe						
er r						
Peny	-	3	.000	-	-	-

Lap	47.1	4	3.374	3.52	3.23
Keu	9			2	3

Berdasarkan tabel tersebut, uji one sampel test dapat dilihat bahwa t hitung - 47.199 (negatif) lebih kecil dari t tabel (1.980). oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Artinya bahwa hipotesis penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh belum dilaksanakan secara optimal.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil uji t Penyajian Laporan keuangan Pemerintah Aceh menunjukkan bahwa nilai uji t hitung = $-47.199 < t$ tabel (1.980). Ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini mempunyai makna bahwa penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Aceh belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, makna lain yang terkandung dari hasil uji t tersebut bahwa Pemerintah Aceh berpotensi akan terjadi penyimpangan penggunaan dana sehingga penggunaan dana tersebut tidak akan digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah Aceh sebagai salah satu pusat pemerintahan di Provinsi Aceh telah melaksanakan penyajian laporan keuangan namun pelaksanaan penyajian laporan keuangan tersebut belum optimal sebagaimana yang diharapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut: (1) Disarankan kepada penelitian selanjutnya/mendatang untuk melakukan penelitian yang sama dengan memasukkan unsur-unsur variabel lainnya, karena dengan satu variabel penulis menganggap akan belum memberikan hasil yang sempurna baik maupun dalam pengembangan ilmu. (2) Disarankan kepada pemerintah di Banda Aceh menggunakan tenaga internal audit yang independen, yaitu tenaga auditornya adalah tenaga ahli dan

independen serta tidak merangkap dengan jabatan lain. Disamping itu internal audit dilaksanakan secara kontinyu minimal sekali dalam satu tahun berjalan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Deddi, Nordiawan. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2008. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Jusuf, Amir Abadi. 2009. *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan, Tahun 2008 Nomor 355/KMK.07/2001. *Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah* Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta..
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Sawyer, Laurence B. Dittlenhofer, & Shceiner. 2005. *Internal Auditing*. Terjemahan Adhariani, Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 2, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung
- Susanto, Azhar, 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya, Bandung
- Tugiman, Hiro, 2008. *Standar Profesional Audit Internal*. Kanisius, Yogyakarta